

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN  
SATU DATA  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**TIM FORUM SATU DATA  
KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2022**

# **PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN PURBALINGGA**

## **1. LATAR BELAKANG**

Pada dasarnya Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Beberapa permasalahan data yang sering terjadi baik di tingkat pusat maupun daerah terkait dengan data yaitu diantaranya: Data statistik sektoral banyak yang tersebar dalam setiap SKPD dan belum tersimpan dalam Satu Data Terpadu sehingga belum dikelola secara baik dan sistematis oleh SKPD. Disamping itu lemahnya konsolidasi data antar SKPD dan kurangnya SDM yang kompeten dalam mengolah data juga menjadi permasalahan data.

Pentingnya satu data yaitu untuk mendorong integrasi data dan layanan pemerintah melalui standarisasi tata kelola data dan interoperabilitas. Layanan pemerintah terintegrasi tidak bisa terwujud apabila kondisi data masih tersebar dan mempunyai standar yang beragam. Dengan data dan layanan pemerintah yang terintegrasi, masyarakat selaku pengguna layanan akan dimudahkan dalam mengakses dan memanfaatkan layanan pemerintah. Disamping itu data yang berkualitas akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas (tepat guna, tepat sasaran, adaptif, berkelanjutan dan progresif), karena pembangunan yang berkualitas akan menghasilkan data yang berkualitas pula.

Dalam teknis penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah khususnya Kabupaten Purbalingga, dilaksanakan melalui Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga. Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga merupakan sarana komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data, Walidata, dan Produsen Data untuk melakukan koordinasi dan komunikasi terkait perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data. Komunikasi dan koordinasi antar Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Purbalingga dengan mempertimbangkan kaidah tata kelola pemerintahan yang baik.

## **2. LANDASAN HUKUM**

- a) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia  
Pasal 2 Ayat 1: Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Pasal 8 Ayat 1: Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik.

Pasal 8 Ayat 2: Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga.

### **3. MEKANISME KERJA FORUM SATU DATA KABUPATEN PURBALINGGA**

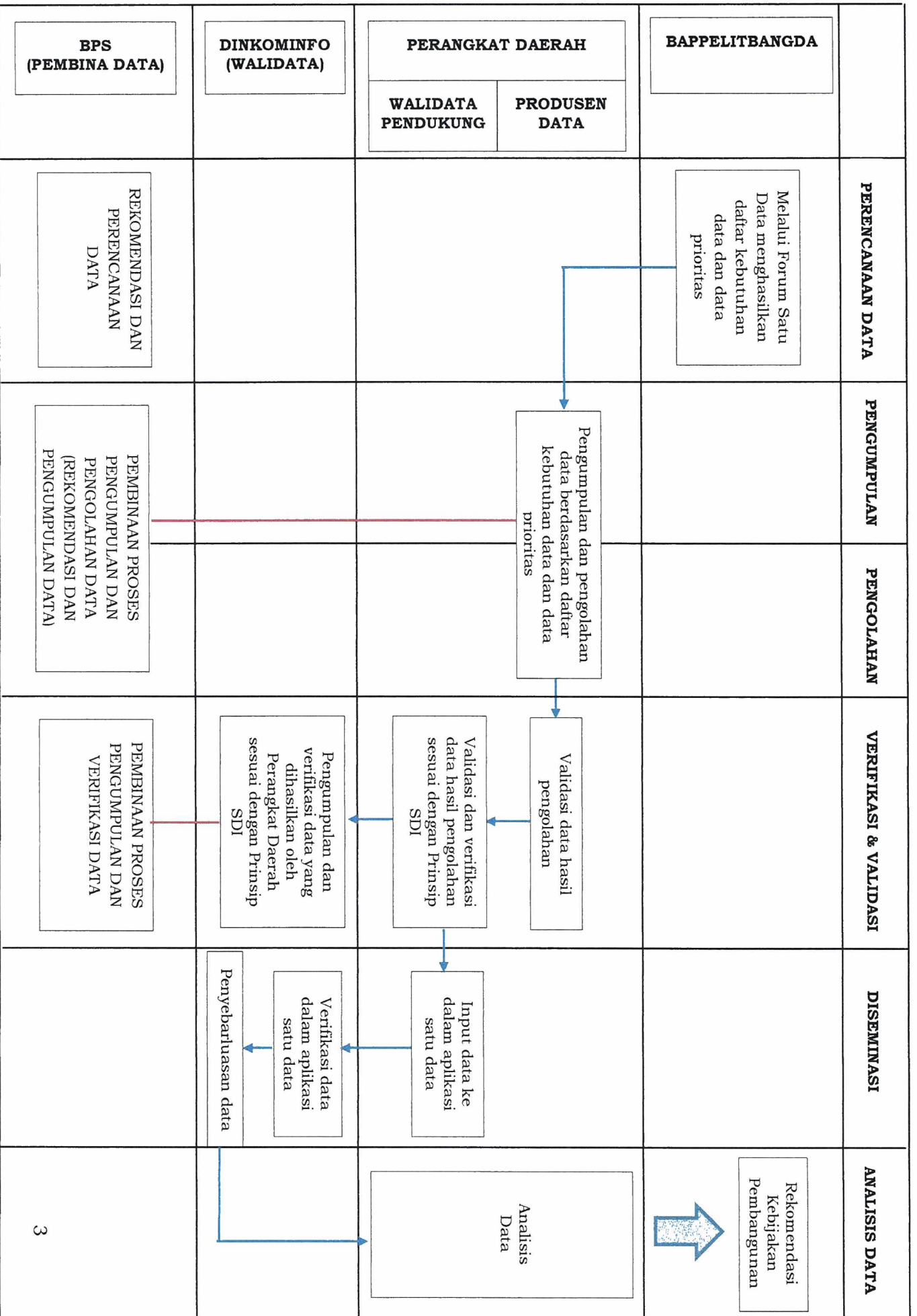
Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kabupaten Purbalingga dilaksanakan melalui Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga. Sesuai dengan Pasal 23 ayat 5 dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga di koordinatori oleh Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari:

- a. Pembina data yaitu Bappelitbangda sebagai Koordinator, BPS sebagai Pembina Data Statistik, DPUPR sebagai Pembina Data Spasial dan Bakeuda sebagai Pembina Data Keuangan;
- b. Walidata yaitu Dinkominfo;
- c. Walidata pendukung yaitu Sekretaris pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- d. Produsen data yaitu seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Dalam pelaksanaan kerjanya, Tim Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga, dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan Pasal 24 Perpres Nomor 39 Tahun 2019, Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah bersifat ex-officio serta secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu Sekretariat Satu Data Kabupaten Purbalingga berada di Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga yang membantu pelaksanaan tugas administrasi maupun teknis operasional kerja Tim Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga.

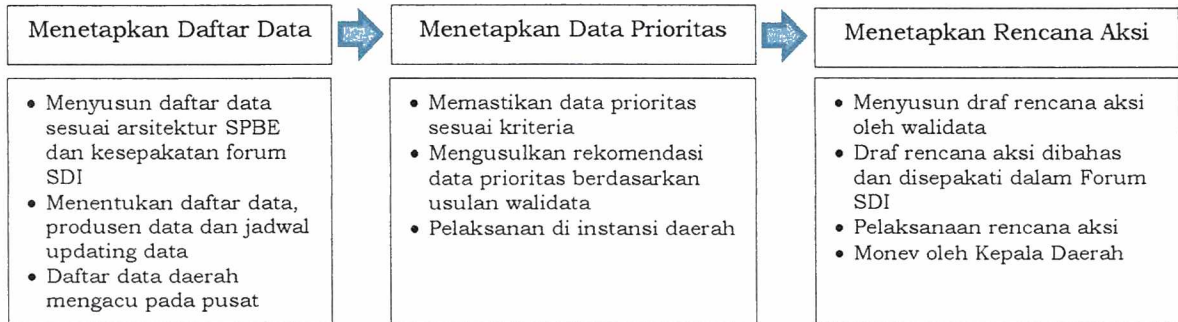
### **4. ALUR PROSES PENYELENGGARAAN KABUPATEN PURBALINGGA**

Dalam penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kabupaten Purbalingga, melalui beberapa tahapan yaitu: Perencanaan, Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Diseminasi serta Analisis Data. Secara rinci dapat dilihat pada bagan berikut ini:

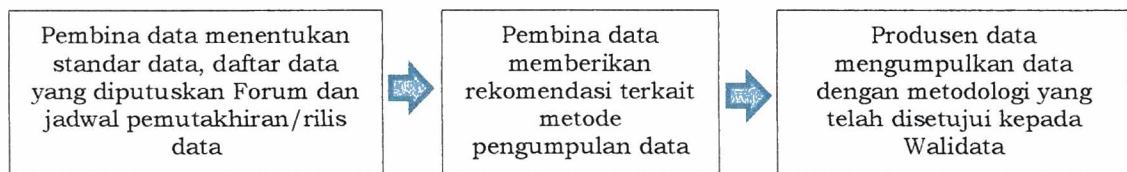


Secara detail untuk alur proses penyelenggaraan satu data Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut:

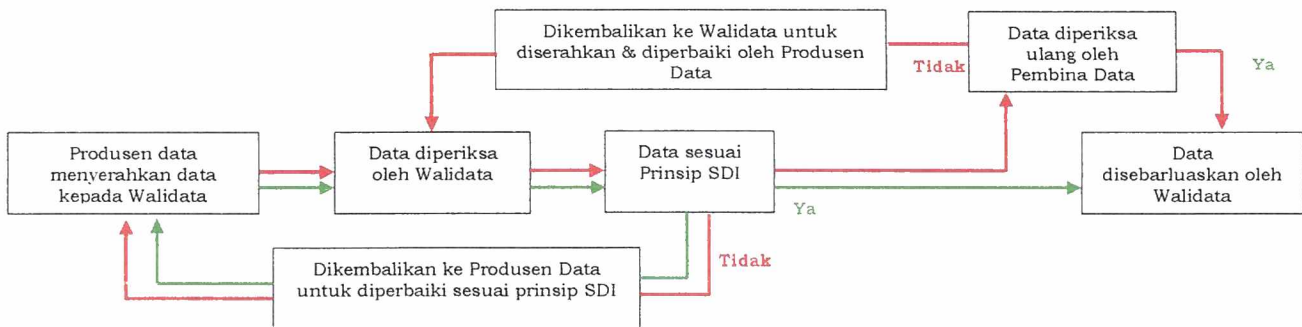
1. Tahap Perencanaan



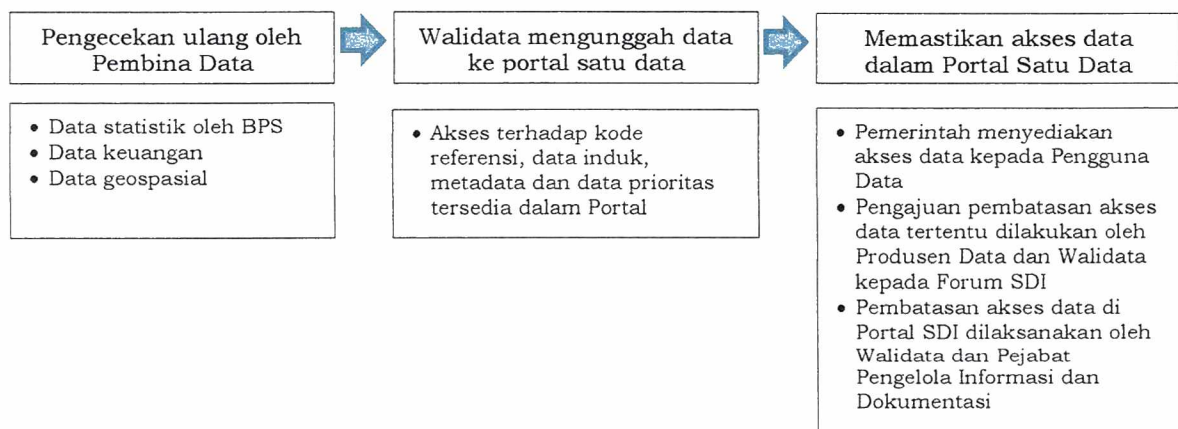
2. Tahap Pengumpulan



3. Tahap Pemeriksaan



4. Tahap Penyebarluasan



## 5. PRINSIP SATU DATA KABUPATEN PURBALINGGA

Prinsip satu data pada dasarnya memuat 4 hal, meliputi:

1. Satu Standar Data  
Standar yang mengatur metodologi yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran dan satuan
2. Satu Metadata  
Informasi terstruktur yang berfungsi untuk menjelaskan isi dan sumber data sehingga dapat mudah untuk ditemukan, digunakan atau dikelola kembali
3. Interoperabilitas  
Merupakan kemampuan data untuk diperlukan atau dibagipakaikan antar sistem yang saling berinteraksi
4. Kode Referensi Data Induk  
Kode referensi tanda berisi karakter yang mengandung/menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik. Data induk merupakan data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah

## 6. DAFTAR DATA DAN DATA PRIORITAS KABUPATEN PURBALINGGA

Daftar data adalah usulan data yang disampaikan oleh Walidata sebagai bahan penyusunan data prioritas dalam Forum Satu Data. Sedangkan Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data. Beberapa data prioritas yang masuk ke dalam daftar data di Kabupaten Purbalingga adalah: Data Pembangunan, eDatabaseSIPD, dan Data SPM. Data pembangunan berisi beberapa komponen data yang ada di ***edatabase.bappeda.jatengprov.go.id*** yang disesuaikan dengan ketersediaannya di Kabupaten Purbalingga. Data Pembangunan tersebut terdiri dari 37 aspek dan dapat diakses pada ***https://s.id/SDIpurbalingga***.

No.	Aspek Data	Sumber Data
1	Aspek Geografi & Demografi	BPS, DPUPR, Dinpendukcapil
2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	BPS
3	Aspek Daya Saing Daerah	BPS
4	Aspek Pendidikan	BPS, Dinpendukcapil, Dindikbud
5	Aspek Kesehatan	Dinkes
6	Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
7	Aspek Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinrumkim
8	Aspek Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	Kesbangpol, Satpol PP, BPBD
9	Aspek Sosial	DinsosdaldukKBP3A
10	Aspek Tenaga Kerja	BPS, Dinnaker
11	Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DinsosdaldukKBP3A
12	Aspek Pangan	DKPP
13	Aspek Pertanahan	Dinrumkim, BPN/ATR
14	Aspek Lingkungan Hidup	DLH
15	Aspek Administrasi Kependudukan dan	Dinpendukcapil

No.	Aspek Data	Sumber Data
	Pencatatan Sipil	
16	Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinpermasdes
17	Aspek Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DinsosdaldukKBP3A
18	Aspek Perhubungan	Dinhub, Polres
19	Aspek Komunikasi dan Informasi	Dinkominfo
20	Aspek Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DinkopUKM
21	Aspek Penanaman Modal	DPMPTSP
22	Aspek Kepemudaan dan Olah Raga	Dinporapar
23	Aspek Statistik	Dinkominfo
24	Aspek Persandian	Dinkominfo
25	Aspek Kebudayaan	Dindikbud
26	Aspek Perpustakaan	Dinarpus
27	Aspek Kearsipan	Dinarpus
28	Aspek Kelautan dan Perikanan	DKPP
29	Aspek Pariwisata	Dinporapar
30	Aspek Pertanian	Dinpertan
31	Aspek Kehutanan	BKPH Gunung Slamet Timur Perum Perhutani KPH Banyumas Timur
32	Aspek ESDM	PLN Area Kabupaten Purbalingga, Dinas ESDM Prov. Jateng
33	Aspek Perdagangan	Dinperindag
34	Aspek Perindustrian	Dinperindag
35	Aspek Transmigrasi	Dinnaker
36	Aspek Unsur Pendukung Pemerintahan	Setda, Setwan
37	Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan	Bakeuda, BKPPD, Bappelitbangda, Inspektorat

Secara rinci daftar data dan data prioritas tersebut meliputi:

1. **ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Geografi & Demografi	Sumber Data
1	Kondisi geografis dan administrasi <i>Lampiran peta batas administrasi (kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan)</i>	BPS & DPUPR
2	Kondisi klimatologi <i>Lampiran peta klimatologi</i>	BPS & DPUPR
3	Kondisi topografi <i>Lampiran peta topografi/kelerengan, morfologi dan jenis tanah</i>	BPS & DPUPR
4	Kondisi Demografi	BPS & Dindukcapil

2. **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Sumber Data
1	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Menurut Lapangan Usaha	BPS
2	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha	BPS
3	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	BPS

No.	Daftar Data Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Sumber Data
4	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	BPS
5	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran	BPS
6	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran	BPS
7	PDRB Per Kapita	
8	Pertumbuhan Ekonomi	BPS
9	Tingkat Inflasi	BPS
10	Angka Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan	BPS
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indikator Pembentuk IPM	BPS
12	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	BPS
13	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	BPS

3. **ASPEK DAYA SAING DAERAH**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Daya Saing Daerah	Sumber Data
1	Rata - Rata Pengeluaran Penduduk	BPS

4. **ASPEK PENDIDIKAN**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Pendidikan	Sumber Data
1	Jumlah Penduduk Menurut Usia Sekolah	BPS/Dindikcapil
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	BPS/ Dindikbud
3	Cakupan Pelayanan Bidang Pendidikan (SPM)	Dindikbud
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Dindikbud
5	Penyelenggaraan PAUD	Dindikbud
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar	Dindikbud
7	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	Dindikbud
8	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	Dindikbud
9	Kondisi Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs	Dindikbud
10	Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan, Angka Putus Sekolah dan Angka Mengulang SD/MI dan SMP/MTs	Dindikbud
11	Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Dindikbud

5. **ASPEK KESEHATAN**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Kesehatan	Sumber Data
1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	Dinkes
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 100.000 Kelahiran Hidup	Dinkes
3	Angka Kematian Balita (AKABA) per 100.000 Kelahiran Hidup	Dinkes
4	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 100.000 Kelahiran Hidup	Dinkes
5	Indeks Keluarga Sehat	Dinkes
6	Angka Kesakitan dan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan	Dinkes
7	Cakupan Pelayanan Bidang Kesehatan (SPM)	Dinkes
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi	Dinkes
9	Trend BBLR dan Prevalensi Balita Gizi Buruk	Dinkes
10	Prevalensi Stunting	Dinkes
11	Kondisi Penyakit Menular (Morbiditas)	Dinkes



No.	Daftar Data Aspek Kesehatan	Sumber Data
12	Kondisi Penyakit Tidak Menular	Dinkes
13	Jumlah Sarana Air Minum dan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat)	
14	Jumlah Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dan Desa Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) /ODF ( <i>Open Defecation Free</i> )	Dinkes
15	Jumlah Fasilitas Kesehatan	Dinkes
16	Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk	Dinkes
17	Jumlah Kunjungan Puskesmas	Dinkes
18	Kinerja Sarana Pelayanan Kesehatan	Dinkes
19	Rasio Dokter	Dinkes
20	Rasio Tenaga Paramedis	Dinkes
21	Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Dinkes

6. **ASPEK PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sumber Data
1	Kondisi Jalan	DPUPR
	<i>Lampiran:</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta jalan yang menunjukkan status dan fungsi jalan</li> <li>• Daftar panjang jalan menurut kecamatan</li> </ul>	
2	Kondisi Jembatan	DPUPR
3	Jenis Perkerasan Jalan	DPUPR
4	Kondisi Drainase	DPUPR
5	Kondisi Jaringan Irigasi/Pengairan	DPUPR
6	Pengelolaan Jasa Konstruksi	DPUPR
7	Kondisi Bangunan Gedung	DPUPR
8	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	DPUPR
9	Kondisi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	DPUPR
10	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	DPUPR&Dinhub

7. **ASPEK PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sumber Data
1	Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan SK Bupati	Dinrumkim
2	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani	Dinrumkim
3	Kondisi Perumahan	Dinrumkim
4	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Berdasarkan Sumber Pembiayaan (Unit)	Dinrumkim
5	Backlog Rumah	Dinrumkim
6	Data Rumah Korban Bencana	BPBD & Dinrumkim
7	Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi	Dinrumkim
8	Layanan Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	Dinrumkim
9	Potensi Air Baku yang dapat Dimanfaatkan	Dinrumkim
10	Ketersediaan Air Baku	Dinrumkim
11	Sistem Pengolahan Air Limbah	DLH & Dinrumkim
12	Cakupan Pelayanan Bidang Perumahan Rakyat (SPM)	Dinrumkim

8. **ASPEK KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM & PERLINDUNGAN MASYARAKAT**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	Sumber Data
1	Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok Massa	Kesbangpol
2	Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan	Kesbangpol
3	Potensi Konflik SARA	Kesbangpol
4	Pemilu	Kesbangpol
5	Jumlah Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	Kesbangpol
6	Indeks Toleransi	Kesbangpol
7	Jumlah Aparat Keamanan dan Ketertiban Umum	Satpol PP
8	Jumlah Sarana Prasarana Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum)	Satpol PP
9	Jumlah Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum)	Satpol PP
10	Jumlah Kasus Sosial	Polres dan Satpol PP
11	Pelayanan Bencana Kebakaran	Satpol PP
12	Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah	BPBD
13	Kejadian Bencana Alam	BPBD
14	Pelayanan Penanggulangan Bencana	BPBD
15	Kondisi Kebencanaan	BPBD
16	Jumlah Desa/Kelurahan yang Rawan Kekeringan	BPBD
17	Cakupan Pelayanan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (SPM)	Satpol PP & BPBD

9. **ASPEK SOSIAL**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Sosial	Sumber Data
1	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	DinsosdaldukKBP3A
2	Jumlah Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	DinsosdaldukKBP3A
3	Penguatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	DinsosdaldukKBP3A
4	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	DinsosdaldukKBP3A
5	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	DinsosdaldukKBP3A
6	Jumlah Dan Luas Taman Makam Pahlawan	DinsosdaldukKBP3A
7	Cakupan Pelayanan Bidang Sosial (SPM)	DinsosdaldukKBP3A
8	Jumlah Sarana Ibadah	BPS & DinsosdaldukKBP3A

10. **ASPEK TENAGA KERJA**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Tenaga Kerja	Sumber Data
1	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	BPS & Dinnaker
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	BPS & Dinnaker
3	Pencari Kerja yang Ditempatkan	BPS & Dinnaker
4	Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan	BPS & Dinnaker
5	Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan	BPS & Dinnaker
6	Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama	BPS & Dinnaker
7	Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek	Dinnaker
8	Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial	Dinnaker

No.	Daftar Data Aspek Tenaga Kerja	Sumber Data
9	Pelatihan Kerja	Dinnaker
10	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Bekerja di Luar Negeri	Dinnaker
11	Tenaga Kerja Warga Negara Asing (WNA)	Dinnaker
12	Upah Minimum Regional (UMR)	Dinnaker

11. **ASPEK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sumber Data
1	Keterlibatan Perempuan dalam Kelembagaan	DinsosdaldukKBP3A
2	Jumlah Pemberdayaan Perempuan	DinsosdaldukKBP3A
3	Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	DinsosdaldukKBP3A
4	Capaian Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	DinsosdaldukKBP3A
5	Data Perlindungan Perempuan dan Anak	DinsosdaldukKBP3A

12. **ASPEK PANGAN**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Pangan	Sumber Data
1	Perkembangan Stabilitas Harga Pangan (Koefisien Variasi Harga Pangan Pokok)	DKPP
2	Skor PPH	DKPP
3	Rincian Konsumsi Kelompok Pangan	DKPP
4	Rincian Produksi Kelompok Pangan	DKPP
5	Neraca Bahan Makanan (NBM)	DKPP
6	Konsumsi Energi Per Kapita/Hari	DKPP
7	Perkembangan Pengawasan Pangan Segar	DKPP
8	Ketersediaan dan Kebutuhan Kelompok Pangan	DKPP
9	Pergudangan Lumbung Pangan	DKPP

13. **ASPEK PERTANAHAN**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Pertanahan	Sumber Data
1	Tanah Milik Pemda	Dinrumkim
2	Jumlah Sertifikat Tanah Program PTSL	BPN/ATR
3	Jenis Hak Atas Tanah	BPN/ATR
4	Luas Tanah Berdasarkan Hak	BPN/ATR
5	Jumlah Kasus Sengketa Tanah	BPN/ATR & Dinrumkim

14. **ASPEK LINGKUNGAN HIDUP**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Lingkungan Hidup	Sumber Data
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	DLH
2	Kondisi Persampahan	DLH
3	Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	DLH
4	Tingkat Pencemaran Lingkungan	DLH
5	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DLH
6	Besaran Emisi GRK Untuk Setiap Sektor	DLH

15. **ASPEK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**, yang meliputi:

	<b>Daftar Data Aspek Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>Sumber Data</b>
1	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Dindukcapil
2	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	Dindukcapil
3	Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Dindukcapil
4	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Dindukcapil
5	Kepemilikan Akta Kelahiran	Dindukcapil
6	Penerbitan Akta Kematian	Dindukcapil
7	Penerbitan Akta Perkawinan	Dindukcapil
8	Penerbitan Akta Perceraian	Dindukcapil
9	Penerbitan Akta Pengangkatan Anak	Dindukcapil
10	Penerbitan Akta Pengesahan Anak	Dindukcapil
11	Data Kependudukan	Dindukcapil

16. **ASPEK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**, yang meliputi:

<b>No.</b>	<b>Daftar Data Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>Sumber Data</b>
1	Indeks Desa Membangun (IDM) dan Status Desa	Dinpermasdes
2	Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	Dinpermasdes
3	Administrasi Pemerintahan Desa	Dinpermasdes
4	Lembaga Kemasyarakatan	Dinpermasdes

17. **ASPEK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**, yang meliputi:

<b>No.</b>	<b>Daftar Data Aspek Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>Sumber Data</b>
1	Pengendalian Penduduk	DinsosdaldukKBP3A
2	Keaktifan Kelompok Tribina	DinsosdaldukKBP3A
3	Keaktifan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	DinsosdaldukKBP3A
4	Peserta KB Aktif	DinsosdaldukKBP3A
5	Unmet Need KB	DinsosdaldukKBP3A
6	Peserta KB Berdasarkan Alat Kontrasepsi/ Metode Kontrasepsi Jangka (MKJP)	DinsosdaldukKBP3A
7	Sapras KB dan Unit Pelayanan KB	DinsosdaldukKBP3A

18. **ASPEK PERHUBUNGAN**, yang meliputi:

<b>No.</b>	<b>Daftar Data Aspek Perhubungan</b>	<b>Sumber Data</b>
	Transportasi Darat	Dinhub
1	Fasilitas Perlengkapan Jalan	Dinhub
2	Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas	Polres & Dinhub
3	Pemasangan LPJU di Ruas Jalan Provinsi	Dinhub
4	Transportasi Udara	Angkasa Pura & Dinhub

19. **ASPEK KOMUNIKASI DAN INFORMASI**, yang meliputi:

<b>No.</b>	<b>Daftar Data Aspek Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Sumber Data</b>
1	Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Dinkominfo
2	Aplikasi Layanan Publik Terintegrasi	Dinkominfo
3	Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik	Dinkominfo
4	Persentase Sub Domain Yang Aktif	Dinkominfo
5	Persentase Badan Publik yang Terbuka	Dinkominfo

No.	Daftar Data Aspek Komunikasi dan Informasi	Sumber Data
6	Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi	Dinkominfo
7	Indeks SPBE	Dinkominfo
8	Layanan Telepon dan Internet	Dinkominfo
9	Layanan POS	BPS & Dinkominfo
10	Layanan Media Elektronik	Dinkominfo

20. **ASPEK KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sumber Data
1	Persentase Koperasi Aktif	DinkopUKM
2	Persentase Koperasi Sehat	DinkopUKM
3	Jenis Koperasi	DinkopUKM
5	Jumlah UMKM	DinkopUKM
6	Perbankan	BPS

21. **ASPEK PENANAMAN MODAL**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Penanaman Modal	Sumber Data
1	Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	DPMPPTSP
2	Nilai Investasi dan Unit Usaha Penanaman Modal Asing (PMA)	DPMPPTSP
3	Nilai Investasi dan Unit Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	DPMPPTSP
4	Pelayanan Perizinan	DPMPPTSP
5	Jumlah Izin yang Diterbitkan	DPMPPTSP
6	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	DPMPPTSP

22. **ASPEK KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Kepemudaan dan Olah Raga	Sumber Data
1	Organisasi dan Fasilitasi Kepemudaan	Dinporapar
2	Fasilitasi Kepemudaan	Dinporapar
3	Sarana Olahraga	Dinporapar

23. **ASPEK STATISTIK**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Statistik	Sumber Data
1	Persentase Ketersediaan Data Sektoral	Dinkominfo

24. **ASPEK PERSANDIAN**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Persandian	Sumber Data
1	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Keamanan Informasi >80	Dinkominfo
2	Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Informasi	Dinkominfo
3	Persentase SDM Pengelola Persandian	Dinkominfo
4	Persentase Layanan Penggunaan Jaringan Komunikasi Sandi	Dinkominfo

25. **ASPEK KEBUDAYAAN**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Kebudayaan	Sumber Data
1	Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya	Dindikbud

No.	Daftar Data Aspek Kebudayaan	Sumber Data
2	Pegiat Seni dan Budaya	Dindikbud
3	Cagar Budaya	Dindikbud
4	Permuseuman	Dindikbud

26. **ASPEK PERPUSTAKAAN**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Perpustakaan	Sumber Data
1	Jumlah Perpustakaan	Dinarpus
2	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan Umum	Dinarpus
3	Jumlah Tenaga Perpustakaan Umum	Dinarpus
4	Pengunjung Perpustakaan Umum	Dinarpus
5	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Dinarpus

27. **ASPEK KEARSIPAN**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Kearsipan	Sumber Data
1	Pengelolaan Arsip Secara Baku	Dinarpus
2	Jumlah Arsip	Dinarpus
3	Digitalisasi Arsip	Dinarpus
4	Tenaga Arsiparis	Dinarpus
5	Monitoring Pengawasan Kearsipan Internal	Dinarpus

28. **ASPEK KELAUTAN DAN PERIKANAN**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Kelautan dan Perikanan	Sumber Data
1	Produksi Perikanan	DKPP
2	Tingkat Konsumsi Ikan Per Kapita Penduduk	DKPP
3	Perikanan Budidaya	DKPP
4	Pembenihan Perikanan Budidaya	DKPP

29. **ASPEK PARIWISATA**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Pariwisata	Sumber Data
1	Jumlah Obyek Wisata	Dinporapar
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Wisatawan Mancanegara	Dinporapar
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan per Obyek Wisata	Dinporapar
4	Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Dinporapar
5	Jumlah Kelompok Sadar Wisata dan Desa Wisata	Dinporapar
6	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Total PDRB dan Penerimaan Daerah dari Pariwisata	Dinporapar
7	Jumlah Usaha Pariwisata	Dinporapar
8	Jenis Penginapan	Dinporapar

30. **ASPEK PERTANIAN**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Pertanian	Sumber Data
1	Tanaman Pangan	Dinpertan
2	Tanaman Hortikultura	Dinpertan
3	Tanaman Perkebunan	Dinpertan
4	Peternakan	Dinpertan
5	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Total PDRB	Dinpertan
6	Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian	Dinpertan
7	Luas Lahan Puso	Dinpertan

No.	Daftar Data Aspek Pertanian	Sumber Data
8	Perkembangan Pemotongan Ternak	Dinpertan
9	Perkembangan Inseminasi Buatan (IB)	Dinpertan
10	Kebutuhan Air	Dinpertan
11	Rincian Produksi Kelompok Pangan	Dinpertan

31. **ASPEK KEHUTANAN**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Kehutanan	Sumber Data
1	Data Kehutanan	BKPH Gunung Slamet Timur
2	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	Perum Perhutani KPH Banyumas Timur

32. **ASPEK ESDM**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek ESDM	Sumber Data
1	Data Kelistrikan	PLN Area Kabupaten Purbalingga
2	Data Mineral Pertambangan	Dinas ESDM Prov. Jateng

33. **ASPEK PERDAGANGAN**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Perdagangan	Sumber Data
1	Perkembangan Neraca Perdagangan	Dinperindag
2	Jumlah Usaha Dagang Kecil dan Menengah dan Izin Usaha Perdagangan	Dinperindag
3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Dinperindag
4	Kinerja Perlindungan Konsumen	Dinperindag
5	Sarana Perdagangan	Dinperindag
6	Ekspor	Dinperindag

34. **ASPEK PERINDUSTRIAN**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Perindustrian	Sumber Data
1	Jumlah Industri	Dinperindag
2	Rincian Jenis Industri Kecil dan Menengah	Dinperindag
3	Rincian Jenis Industri Besar	Dinperindag
4	Pengembangan Klaster Industri	Dinperindag
5	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Dinperindag

35. **ASPEK TRANSMIGRASI**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Transmigrasi	Sumber Data
1	Pengiriman Transmigran	Dinnaker

36. **ASPEK UNSUR PENDUKUNG PEMERINTAHAN**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Unsur Pendukung Pemerintahan	Sumber Data
1	Capaian IKM, SAKIP dan IRB	Bag. Ortala Setda
2	Rincian Hasil Nilai SAKIP	Bag. Ortala Setda
3	Jumlah Fasilitasi Produk Hukum dan Fasilitasi Penyusunan Raperda	Bag. Hukum Setda
4	Jumlah Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan	Bag. Hukum Setda

No.	Daftar Data Aspek Unsur Pendukung Pemerintahan	Sumber Data
	Evaluasi Raperda	
5	Jumlah Produk Hukum Daerah	Bag. Hukum Setda
6	Jumlah LBH yang bekerjasama dengan Kabupaten Purbalingga dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin	Bag. Hukum Setda
7	Hibah Bagian Kesra	Bag. Kesra Setda
8	Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Bag. ULP Setda
9	Jumlah BUMD Milik Pemerintah	Bag. Perekonomian Setda
10	Kegiatan Pembangunan dan Pelaksanaan Pilkades & PATEN	Bag. Adbang & Tapem Setda
11	Hasil Survei Atas Pelayanan Sekretariat DPRD	Setwan
12	Jumlah Anggota DPRD	Setwan
13	Jumlah Produk yang Dihasilkan DPRD	Setwan

37. **ASPEK PENUNJANG PEMERINTAHAN**, yang meliputi:

No.	Daftar Data Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan	Sumber Data
1	Kondisi Keuangan Daerah	Bakeuda
2	Neraca Keuangan Daerah	Bakeuda
3	Kewajiban dan Ekuitas Keuangan Daerah	Bakeuda
4	Proporsi Pendapatan Daerah	Bakeuda
5	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Atas Aset yang Menjadi Pendapatan	Bakeuda
6	Persentase Dokumen Anggaran dan Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Bakeuda
7	Persentase PBB yang terbayar oleh Wajib Pajak	Bakeuda
8	Indeks Profesionalitas ASN Per Dimensi dan Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	BKPPD
9	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)	BKPPD
10	Pengadaan CPNS	BKPPD
11	Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar	BKPPD
12	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat	BKPPD
13	Mutasi PNS	BKPPD
14	Skor Perencanaan	Bappelitbangda
15	Penelitian dan Kelitbangan	Bappelitbangda
16	Data Bidang Pengawasan	Inspektorat

KEPALA BAPPELITBANGDA  
KABUPATEN PURBALINGGA  
SELAKU  
KETUA TIM FORUM SATU DATA PURBALINGGA



Drs. SUROTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700203 199001 1 001